

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang digunakan oleh masyarakat luas untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Salah satu bentuk akomodasi bank adalah adanya perbankan syariah yang menyediakan berbagai macam produk yang diinginkan oleh masyarakat yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah memiliki bermacam macam produk sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Kondisi perekonomian saat ini masih menjadi focus utama dalam pemulihan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh kesenjangan social namun sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomin nasional, pemerintah harus menerapkan beberapa program yang tepat. Melihat hal ini, dirasa perlu bahwa Indonesia harus kembali berfokus kepada sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karena apabila dilihat dari perkembangan dan perannya diperekonomian nasional, sector UMKM dipercaya mampu memberikan kontribusi sebagai penopang perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak rentan terhadap berbagai

---

<sup>1</sup> Vita, D. I. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB: Implementasi pada Akad Murabahah di BRI Syariah KC Malang*. *JIEP-Vol. 19, No. 1* , 14.

perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang digunakan sebagai penunjang pengembangan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu nasabah dalam melakukan pembiayaan mikro. Pembiayaan tersebut diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk tambahan modal ataupun investasi usaha. Dengan adanya pembiayaan mikro tersebut nasabah bisa lebih mudah untuk mendapatkan tambahan modal usaha sehingga bisa mengembangkan usahanya.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan mikro telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu tujuan lembaga keuangan mikro sebagai organisasi pembangunan yaitu untuk melayani kebutuhan *financial* dari pasar yang tidak terlayani dengan baik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, membantu usaha-usaha yang telah ada untuk meningkatkan kegiatannya, memberdayakan perempuan atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan mendorong pembangunan usaha baru.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rafika Rahmawati, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Omzet UMKM (Studi Kasus Pada PT BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang. *Jurnal Unisma Masalah* Vol. 12 No. 2.

<sup>3</sup> *Ibid, Vita*, h, 13

<sup>4</sup> Arsyad, L. (2008). *Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: Andi Offset

Sebagian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Minimnya dana terkadang membuat sebagian besar masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank untuk perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu pembiayaan dari lembaga keuangan yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yaitu dengan pembiayaan mikro. Sebagaimana diketahui, pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Pembiayaan mikro tersebut diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad jual beli (*murabahah*).<sup>5</sup>

Pembiayaan mikro paling tinggi penyalurannya yaitu terutama pada produk KUR Mikro iB.<sup>6</sup> Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia (SPI) OJK, Bank Syariah Indonesia masih membukukan kinerja positif untuk penyaluran pembiayaan segmen mikro positif hingga paruh pertama tahun ini. Pembiayaan mikro yang disalurkan emiten bersandi BRIS ini mencapai Rp 9,5 triliun per Juni 2020, tumbuh 150% secara tahunan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.

<sup>6</sup> Pracoyo, T. K. (2006). *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

<sup>7</sup> M. Richard. (2020, Juli 15). *Bisnis.com*. Retrieved Desember 08, 2020, from *BRI Syariah Tetap Tumbuh di Tengah Pandemi dengan i-*

Pemerintah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500Juta. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.<sup>8</sup>

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat amanah dari pemerintah sebagai salah satu lembaga keuangan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2022.<sup>9</sup>

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) konsisten meningkat tiap tahun selama periode 2015-2021. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 2015 realisasi penyaluran KUR baru berjumlah Rp22,75 triliun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya nilainya terus bertambah seperti terlihat pada grafik, hingga mencapai Rp281,86 triliun pada 2021.

---

*Kurma*:<https://m.bisnis.com/amp/read/20200715/231/1266618/bri-syariah-tetap-tumbuh-di-tengah-pandemi-dengan-i-kurma>

<sup>8</sup> Maryama, S. (2015). Kendala Usaha Mikro Dalam Mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Liquidity Vol. 4, No. 1*, 83.

<sup>9</sup> Bank Syariah Indonesia : "Sejarah Perusahaan", <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada 10 Juni 2022.

Sepanjang 2021, realisasi penyaluran KUR dilaporkan paling banyak masuk ke segmen KUR Mikro (63,71%), diikuti KUR Kecil (32,71%), KUR Super Mikro (3,57%), dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (0,01%). KUR Super Mikro memiliki plafon kredit maksimal sebesar Rp10 juta per penerima. KUR jenis ini diprioritaskan untuk ibu rumah tangga dan pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjalankan usaha. Sedangkan KUR Mikro memiliki plafon di kisaran Rp10 juta-Rp50 juta, dan KUR Kecil di kisaran Rp50 juta-Rp500 juta.<sup>10</sup> Pembiayaan KUR ini di peruntukan bagi wirausaha atau pengusaha dengan lama usaha minimal 6 bulan. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur minimal 21 tahun atau telah menikah.

Namun, dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak selalu mulus. Nasabah memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, dari beberapa sifat dan karakter nasabah bisa menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi masih mengalami pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan bank dan juga berdampak pada tidak terlunasinya pinjaman sebagian atau seluruhnya Produk-produk pembiayaan mikro tersebut tidaklah selalu mulus pasti ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank

---

<sup>10</sup> Ahdiat, A. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Makin Besar Tiap Tahun (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/penyaluran-kredit-usaha-rakyat-makin-besar-tiap-tahun>), diakses tanggal 21 Agustus 2022

konvensional maupun bank syariah. Pembiayaan. Tingkat kesehatan likuiditas bank akan memburuk jika pembiayaan bermasalah semakin besar. Tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya di bank juga akan menurun.<sup>11</sup>

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ismail. (2013). Manajemen Perbankan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

<sup>12</sup> Ubaidillah. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. Jurnal Ekonomi Islam, 307

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia 2017-2021**

	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pembiayaan Bermasalah/ NPF-nett	4,75%	4,99%	3,38%	1,12%	0,87%

Sumber: Laporan Rasio Keuangan, 2021

Berdasarkan data diatas, melihat pada nilai nilai NPF (*Non Performing Financing*) pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2018 berada dikisaran 4,99%. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran bank dalam hal pembiayaan hampir menunjukkan persentase yang kurang baik jika merujuk pada Bank Indonesia adalah sebesar 5%, ini terbukti bahwa kinerja perbankan syariah cukup baik dan diharapkan akan lebih baik lagi agar dapat mengurangi tingkat NPFnya. Dengan jumlah pembiayaan yang semakin besar, maka risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah juga semakin besar. Dengan begitu BUS dan UUS harus mampu melakukan manajemen dan mitigasi risiko dengan baik agar dapat mengantisipasi terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan NPF, karena risiko pembiayaan akan berpengaruh pada tingkat likuiditas perbankan syariah. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan persentase menjadi 0,87%, meskipun mengalami penurunan yang jauh akan tetapi masih timbul pembiayaan masalah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia.

Permasalahan dalam pembiayaan tersebut disebabkan adanya faktor *internal* dan juga faktor *eksternal*. Adapun kelalaian dari pihak bank dalam pengawasan terhadap pegawai atau kurangnya ketelitian dari pihak bank tersebut dalam menganalisis nasabah pembiayaan merupakan salah satu faktor *internal* yang salah satunya menjadi penyebab terjadinya *Non Performing Financing*. Sehingga akan muncul berbagai praktik kolusi antara pejabat bank yang kurang baik sehingga apabila terjadi tunggakan pinjaman maka jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi dengan lancar. Sedangkan faktor *eksternal* yang dapat menimbulkan adanya *non performing financing* yaitu nasabah dalam penggunaan dana, nasabah menggunakan dana pembiayaan yang diajukan tersebut tidak sesuai dengan tujuan.<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas penulis tertarik ingin menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi masalah pada produk KUR Mikro Kecil iB agar pembahasan tidak terlalu meluas.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group



1. Bagaimana produk pembiayaan KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi?
4. Bagaimana analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bekasi.
3. Untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan Bank Syariah Indonesia dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB Kantor Cabang Bekasi.
4. Untuk menganalisa penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Akademisi, sebagai informasi bahan bacaan serta bahan acuan dan rujukan dalam kegiatan belajar mengajar para pendidik khususnya tentang pembiayaan bermasalah.
2. Bagi Peneliti, agar dapat menambah dan berbagi pengetahuan tentang pemahaman pembiayaan bermasalah pada produk KUR Mikro iB di Bank Syariah Indonesia.
3. Bagi Masyarakat, sebagai peningkatan kesejahteraan umat agar menambah kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia.
4. Bagi Bank Syariah, agar dapat menangani nasabah pembiayaan bermasalah yang tepat dan efektif.